

BAB II

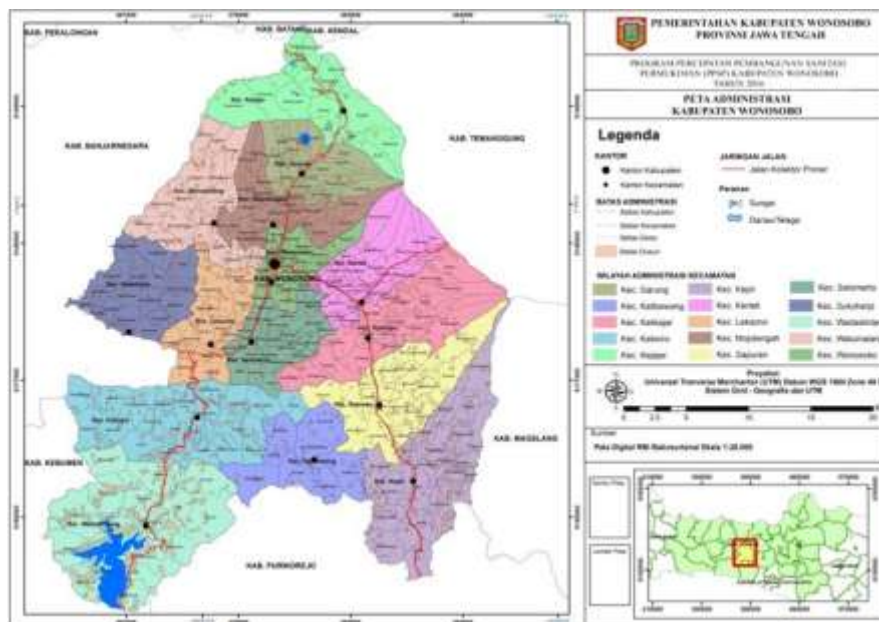
GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Wonosobo

2.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo secara astronomis berada di antara $7^{\circ}11'$ - $7^{\circ}36'$ Lintang Selatan serta $109^{\circ}43'$ - $110^{\circ}04'$ Bujur Timur. Luas wilayahnya mencapai 984,68 km². Secara geografis, Kabupaten Wonosobo berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang
- Sebelah Timur : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo
- Sebelah Barat : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo

Sumber: [Website Resmi Pemkab Wonosobo - Pemerintah Kabupaten Wonosobo](http://www.wonosoboprov.go.id)

Kabupaten Wonosobo memiliki 15 kecamatan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Wadaslintang, yang mencakup area sebesar 127,16 km², sementara kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Wonosobo, dengan luas 32,28 km². Berikut daftar kecamatan di Kabupaten Wonosobo:

Tabel 2.1. Pembagian Administrasi Per Kecamatan di Kabupaten Wonosobo

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (km²/sq.km)
Wadaslintang	Wadaslintang	127,16
Kepil	Kepil	93,87
Sapuran	Sapuran	77,72
Kalibawang	Kalibawang	47,82
Kaliwiro	Kaliwiro	100,08
Leksono	Leksono	44,07
Sukoharjo	Sukoharjo	54,29
Selomerto	Selomerto	39,71
Kalikajar	Kalikajar	83,3
Kertek	Kertek	62,14
Wonosobo	Wonosobo	32,38
Watumalang	Watumalang	68,23
Mojotengah	Mojotengah	45,07
Garung	Garung	51,22
Kejajar	Kejajar	57,62
Wonosobo		984,68

Sumber: BPS, Kabupaten Wonosobo dalam Angka 2024.

2.1.2. Kondisi Demografis Kabupaten Wonosobo

Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo tercatat sebanyak 790.491 jiwa. Jumlah ini meningkat pesat pada tahun 2020 menjadi 879.124 jiwa. Kenaikan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan 886.613 jiwa di tahun 2021, 898.622 jiwa di tahun 2022, dan mencapai 909.664 jiwa pada tahun 2023. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang konsisten di Kabupaten Wonosobo selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Setiap Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1.	Wadaslintang	6,90	494
2.	Kepil	7,30	708
3.	Sapuran	6,91	809
4.	Kalibawang	3,12	594
5.	Kaliwiro	5,91	538
6.	Leksono	5,27	1.088
7.	Sukoharjo	4,00	671
8.	Selomerto	6,13	1.404
9.	Kalikajar	8,11	886
10.	Kertek	10,30	1.508
11.	Wonosobo	10,32	2.899
12.	Watumalang	6,32	842
13.	Mojotengah	7,67	1.547
14.	Garung	6,52	1.158
15.	Kejajar	5,21	822

Sumber: BPS, Kabupaten Wonosobo dalam Angka 2024.

Persebaran penduduk di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 masih belum merata. Kecamatan Wonosobo memiliki kepadatan tertinggi, mencapai 2.899 jiwa/km², diikuti oleh Kertek 1.508 jiwa/km² dan Mojotengah 1.547 jiwa/km². Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Wadaslintang 494 jiwa/km², Kaliwiro 538 jiwa/km², dan Kalibawang 594 jiwa/km².

2.1.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Wonosobo

Bersumber dari RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 (Pemerintah Kabupaten Wonosobo, 2025), Sektor pertanian, industri pengolahan, serta perdagangan menjadi penopang utama struktur ekonomi Kabupaten Wonosobo, dengan kontribusi mencapai 64,56% terhadap PDRB. Ketiga sektor tersebut membentuk rantai agrobisnis, di mana pertanian berperan sebagai penyedia bahan baku, industri mengolahnya, dan perdagangan menyalurkannya ke pasar.

Industri pengolahan sendiri didominasi oleh produk makanan berbasis komoditas pertanian lokal, yakni sekitar 85,32%.

Selain sektor agrobisnis, pariwisata juga berperan penting dalam perekonomian daerah melalui bidang akomodasi, makanan dan minuman, serta transportasi dan pergudangan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 10,64% terhadap PDRB. Jika digabungkan, agrobisnis dan pariwisata menjadi sektor utama penopang ekonomi Wonosobo, karena keduanya tidak hanya menyumbang PDRB terbesar, tetapi juga menyediakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat (Pemerintah Kabupaten Wonosobo, 2025).

Tabel 2.3. Kontribusi Agrobisnis dan Pariwisata (%) Terhadap PDRB Kabupaten Wonosobo

No.	Sektor	Kontribusi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Agrobisnis	65,74	65,87	64,29	63,54	63,38
2.	Pariwisata	8,93	8,94	11,27	12,00	12,08
Total		74,67	74,81	75,56	75,54	75,46

Sumber: RPJMD Kabupaten Wonosobo, 2025-2029.

Data tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa kontribusi sektor agrobisnis relatif stabil, yaitu antara 63–66%, sedangkan sektor pariwisata mengalami peningkatan dari 8,93% pada tahun 2020 menjadi 12,08% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, kedua sektor tersebut menyumbang lebih dari 74% terhadap PDRB Wonosobo, yang menunjukkan peran dominan keduanya dalam perekonomian daerah.

Di Kabupaten Wonosobo, subsektor hortikultura didominasi oleh tanaman sayuran semusim, seperti labu siam, kubis, kentang, bawang daun, cabai besar, sawi, dan cabai rawit. Komoditas-komoditas ini menjadi yang paling banyak

dusahakan petani dan mendominasi hasil produksi sayuran semusim. Akan tetapi, labu siam termasuk komoditas dengan nilai ekonomi yang rendah, sehingga banyak petani memilih beralih ke tanaman hortikultura lain yang dianggap lebih menguntungkan (BPS Wonosobo, 2023).

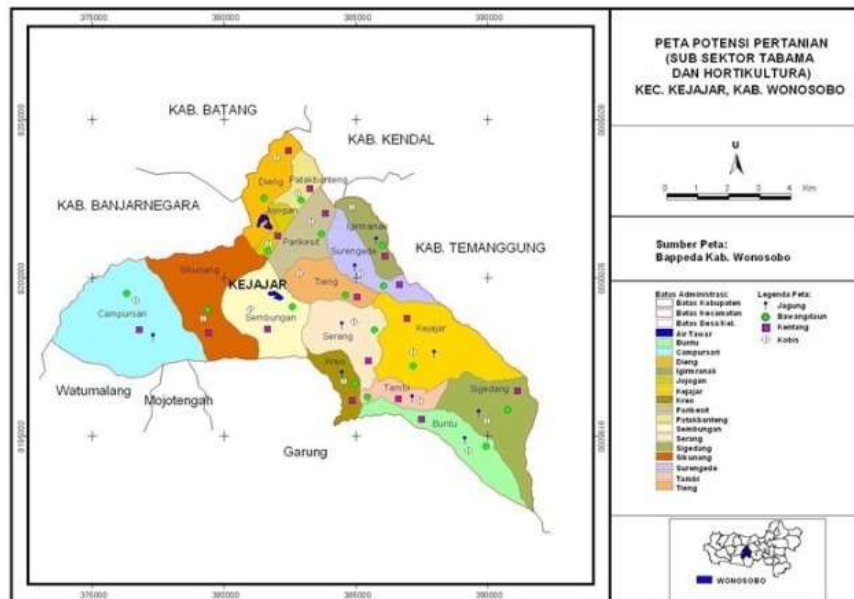
2.2. Gambaran Umum Kecamatan Kejajar

2.2.1. Kondisi Geografis Kecamatan Kejajar

Kecamatan Kejajar adalah salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo yang berada pada ketinggian antara 1.400 hingga 2.143 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Kejajar memiliki luas wilayah 65,38 km², atau sekitar 6,46 persen dari total luas Kabupaten Wonosobo. Secara umum, tanah di kecamatan ini sangat subur, sehingga cocok untuk berbagai jenis pertanian, termasuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (BPS Wonosobo, 2024b).

Kecamatan ini berbatasan dengan wilayah, berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Batang
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Temanggung
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Garung
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Banjarnegara



Gambar 2.2. Peta Administrasi Kecamatan Kejajar

Sumber:

https://kelurahankejajar.wonosobokab.go.id/postings/details/2626/Profil_Wilayah_Kelurahan_Kejajar.

Kecamatan Kejajar memiliki 16 desa. Desa dengan wilayah terluas adalah Campursari, yang mencakup area sebesar 8,13 km², sementara desa dengan wilayah terkecil adalah Igirmranak, dengan luas 1,59 km². Berikut daftar desa/kelurahan di Kecamatan Kejajar:

Tabel 2.4. Pembagian Administrasi Per Desa/Kelurahan di Kecamatan Kejajar

Desa/Kelurahan	Luas (km²/sq.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
Buntu	5,65	8,64
Sigedang	7,77	11,89
Tambi	4,15	6,34
Kreo	3,53	5,39
Serang	3,71	5,67
Kejajar	5,02	7,67
Igirmranak	1,59	2,44
Surengede	3,87	5,92
Tieng	2,18	3,33
Parikesit	2,13	3,25
Sembungan	3,61	5,52
Jojogan	1,33	2,03
Patakbanteng	3,98	6,08
Dieng	2,20	3,37
Sikunang	6,54	10,01
Campursari	8,13	12,44
Kecamatan Kejajar	65,38	100

Sumber: BPS Wonosobo, Kecamatan Kejajar dalam Angka 2024.

Tabel tersebut menunjukkan luas masing-masing desa di Kecamatan Kejajar beserta persentasenya terhadap total wilayah kecamatan. Dari data tersebut, Desa Campursari memiliki wilayah paling luas, sedangkan Desa Jojogan menjadi yang paling sempit. Perbedaan luas ini menggambarkan variasi besaran wilayah administratif yang dimiliki setiap desa di Kecamatan Kejajar.

2.2.2. Kondisi Demografis Kecamatan Kejajar

Pada tahun 2019, jumlah penduduk tercatat sebanyak 43.368 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 46.197 jiwa dan terus bertambah pada tahun 2021 mencapai 46.447 jiwa. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan jumlah penduduk mencapai 47.884 jiwa. Data tersebut menunjukkan tren pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kejajar, dengan peningkatan yang cukup stabil dari tahun ke tahun.

Secara administratif Kecamatan Kejajar terdiri dari 16 desa/kelurahan secara administratif. Desa dengan penduduk terbanyak adalah Tambi (5.963 jiwa atau 12,32% dari total kecamatan), sedangkan Igirmranak memiliki jumlah penduduk paling sedikit (816 jiwa atau 1,69%).

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Kejajar Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1.	Buntu	2.939	520
2.	Sigedang	3.348	431
3.	Tambi	5.963	1.438
4.	Kreo	1.958	555
5.	Serang	5.475	1.477
6.	Kejajar	3.880	773
7.	Igirmranak	816	512
8.	Surengede	3.854	996
9.	Tieng	4.516	2.074
10.	Parikesit	2.333	1.096
11.	Sembungan	1.420	393
12.	Jojogan	1.625	1.222
13.	Patakbanteng	2.595	653
14.	Dieng	2.344	1.064
15.	Sikunang	2.529	387
16.	Campursari	2.817	346

Sumber: BPS Wonosobo, Kecamatan Kejajar dalam Angka 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa persebaran penduduk di Kecamatan Kejajar belum merata. Beberapa desa memiliki jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi, sementara desa lainnya jauh lebih rendah. Kepadatan penduduk Kecamatan Kejajar mencapai 740 jiwa/km². Desa Tieng menjadi yang terpadat dengan 2.074 jiwa/km², sementara Campursari memiliki kepadatan terendah, hanya 101 jiwa/km².

2.2.3. Kondisi Perekonomian Kecamatan Kejajar

Terletak di dataran tinggi, Kecamatan Kejajar dikenal sebagai penghasil berbagai tanaman hortikultura musiman, seperti kentang, kubis, dan wortel. Kentang Dieng menjadi komoditas unggulan yang dipasarkan ke berbagai wilayah di Indonesia hingga ke pasar internasional. Pada tahun 2023, luas lahan panen kentang di Kecamatan Kejajar mencapai 2.550 hektar, dengan total produksi sekitar 446 ribu kuintal (BPS, Kecamatan Kejajar dalam Angka 2024).

Tabel 2.6. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian dan Usaha Pertanian Perorangan Tanaman Hortikultura Semusim dan Tahunan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kejajar, 2023

Desa/ Kelurahan	Tanaman Semusim		Tanaman Tahunan	
	Rumah Tangga Usaha Pertanian	Usaha Pertanian Perorangan	Rumah Tangga Usaha Pertanian	Usaha Pertanian Perorangan
Buntu	589	594	6	6
Sigedang	730	739	23	23
Tambi	633	637	7	7
Kreo	301	305	2	2
Serang	822	849	7	7
Kejajar	374	375	8	8
Igirmranak	176	176	-	-
Surengede	696	701	1	1
Tieng	677	687	8	8
Parikesit	531	541	8	8
Sembungan	345	351	9	9
Jojogan	365	365	-	-
Patakbanteng	469	492	6	6
Dieng	425	441	-	-
Sikunang	589	616	1	1
Campursari	529	536	-	-
Kecamatan Kejajar	8.251	8.405	86	86

Sumber: BPS Wonosobo, Hasil Sensus Pertanian Kecamatan Kejajar 2023.

Berdasarkan tabel tersebut, hampir semua desa di Kecamatan Kejajar memiliki rumah tangga usaha pertanian yang didominasi oleh tanaman semusim, dengan jumlah jauh lebih banyak dibandingkan tanaman tahunan. Jenis usaha pertanian yang dijalankan secara perorangan juga sejalan dengan jumlah rumah tangga tani, sehingga menunjukkan pola usaha yang masih bersifat individual. Secara keseluruhan, kondisi tersebut menggambarkan bahwa pertanian di Kecamatan Kejajar sangat bergantung pada komoditas semusim sebagai sumber utama mata pencaharian masyarakat.

Komoditas yang mendominasi usaha pertanian di Kecamatan Kejajar adalah tanaman pangan 1,16%, hortikultura 95,2%, perkebunan 14,72%, peternakan 6,18%, serta sektor lainnya dalam jumlah kecil. Adapun komoditas sayuran yang dibudidayakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7. Jumlah Rumah Tangga Usaha Hortikultura Semusim Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Tanaman di Kecamatan Kejajar, 2023

Desa/Kelurahan	Taman Hortikultura Semusim				Kentang
	Cabai Rawit	Cabai Hijau	Cabai Merah	Cabai Keriting	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Buntu	5	154	6	34	314
Sigedang	-	12	1	2	542
Tambi	9	112	15	45	168
Kreo	3	56	2	17	51
Serang	14	148	6	13	445
Kejajar	6	56	2	6	192
Igirmranak	-	1	-	-	159
Surengede	-	12	-	3	572
Tieng	1	23	1	7	473
Parikesit	-	2	-	-	527
Sembungan	-	4	-	-	345
Jojogan	-	1	-	-	365
Patakbanteng	-	5	-	1	463
Dieng	-	-	-	-	422
Sikunang	2	1	-	-	585

Campursari	-	5	41	2	486
Kecamatan Kejajar	40	592	74	130	6.109

Sumber: BPS Wonosobo, Hasil Sensus Pertanian Kecamatan Kejajar 2023.

Desa/Kelurahan	Taman Hortikultura Semusim				
	Wortel	Kubis	Bawang Daun	Seledri	Bawang Merah
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Buntu	306	188	86	46	24
Sigedang	683	104	7	-	2
Tambi	410	297	54	72	10
Kreo	257	82	7	-	1
Serang	683	334	73	12	17
Kejajar	271	158	19	5	12
Igirmranak	34	10	-	-	-
Surengede	366	149	8	-	5
Tieng	329	117	22	-	12
Parikesit	16	4	1	-	-
Sembungan	-	1	2	-	-
Jojogan	15	20	5	-	1
Patakbanteng	20	22	-	-	1
Dieng	21	14	-	-	-
Sikunang	28	32	-	-	-
Campursari	129	118	12	1	-
Kecamatan Kejajar	3.568	1.710	296	136	85

Sumber: BPS Wonosobo, Hasil Sensus Pertanian Kecamatan Kejajar 2023.

Data pada tabel menunjukkan bahwa kentang merupakan komoditas hortikultura semusim dengan jumlah rumah tangga usaha paling banyak di Kecamatan Kejajar, jauh melebihi komoditas lainnya. Di beberapa desa, tanaman seperti wortel, kubis, dan bawang daun juga cukup banyak dibudidayakan, meskipun penyebarannya tidak seluas kentang. Sementara itu, berbagai jenis cabai, seperti cabai rawit, hijau, merah, dan keriting, ditemukan hampir di seluruh desa, namun jumlah petani yang menanamnya relatif lebih sedikit. Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan bahwa sistem usaha hortikultura di Kecamatan Kejajar

bertumpu pada budidaya kentang, sedangkan komoditas lain berperan sebagai penunjang.

2.3. Gambaran Umum Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (Dispaperkan) Kabupaten Wonosobo dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 dan diperbarui melalui Perbup Nomor 17 Tahun 2022. Dinas ini merupakan gabungan dari beberapa instansi, termasuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, sektor perkebunan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta Badan Ketahanan Pangan.

Sebagai dinas tipe A, Dispaperkan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan. Selain itu, dinas ini mendukung visi RPJMD 2021-2026 untuk mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera.

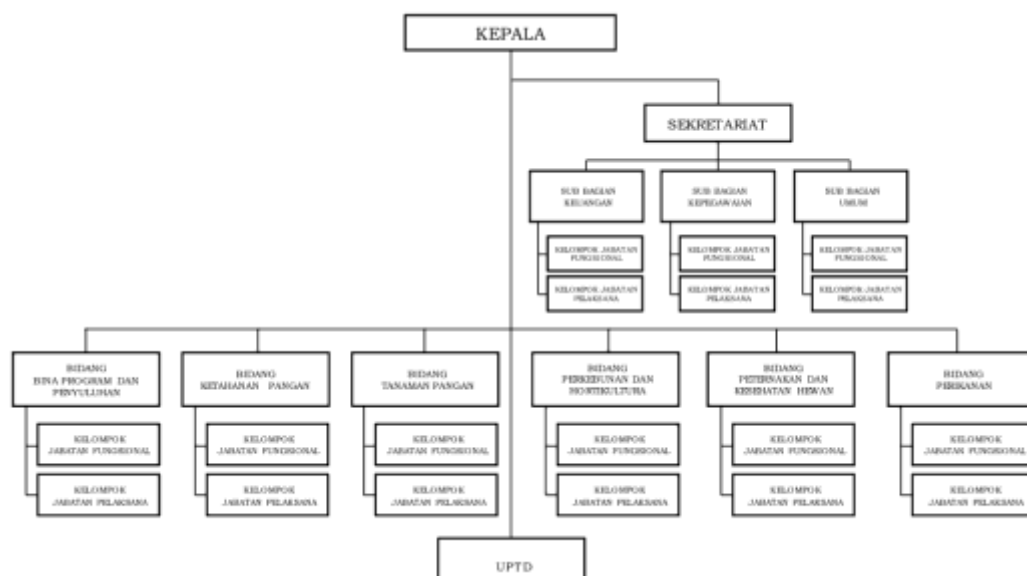
2.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 Pasal 27, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dispaperkan Kabupaten Wonosobo, sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian serta perikanan. Tugas utamanya adalah mendukung bupati dalam mengelola kewenangan daerah serta tugas pembantuan di ketiga bidang tersebut. Adapun dalam melaksanakan tugasnya, secara garis besar, fungsi Dinas ini meliputi perumusan, pelaksanaan, dan koordinasi kebijakan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan; penyediaan serta pengoordinasian infrastruktur

pendukung; penyelenggaraan urusan pangan, pertanian, dan perikanan beserta penyuluhan dan perizinannya; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; serta fungsi kesekretariatan, pengendalian UPTD, dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.3.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Dinas Paperkan Kabupaten Wonosobo diilustrasikan ke dalam gambar berikut.



Gambar 2.3. Struktur Organisasi Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

Sumber: Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 Pasal 27, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dispaperkan Kabupaten Wonosobo.

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;

3) Sub Bagian Umum.

- c. Bidang Bina Program dan Penyuluhan;
- d. Bidang Ketahanan Pangan;
- e. Bidang Tanaman Pangan;
- f. Bidang Perkebunan dan Hortikultura;
- g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h. Bidang Perikanan;
- i. UPTD;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. Kelompok Jabatan Pelaksana.

2.3.3. Bidang Perkebunan dan Hortikultura

Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 Pasal 27, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dispaperkan Kabupaten Wonosobo, Bidang Perkebunan dan Hortikultura memiliki peran penting dalam menyusun, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan terkait sektor perkebunan dan hortikultura. Tugas utamanya mencakup penyusunan kebijakan, pengawasan sarana pertanian, serta pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Selain itu, bidang ini juga bertanggung jawab dalam pemberian izin usaha, bimbingan teknis, serta supervisi bagi pelaku usaha perkebunan dan hortikultura. Sebagai upaya untuk memastikan efektivitas program, dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala guna mendukung keberlanjutan sektor ini.

2.4. Gambaran Umum Kebijakan Subsidi Pupuk

Kebijakan subsidi pupuk di Indonesia telah lama menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung sektor pertanian. Tujuan utamanya adalah memastikan ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau bagi petani agar produktivitas pertanian meningkat dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Kebijakan ini mulai diterapkan sejak masa Orde Baru, ketika pemerintah memberikan subsidi pupuk untuk mencapai swasembada pangan, terutama beras. Seiring waktu, kebijakan tersebut mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian untuk menanggapi tantangan baru, seperti fluktuasi harga pupuk di pasar global, perubahan iklim, serta kebutuhan petani yang semakin beragam. Hingga saat ini, kebijakan subsidi pupuk terus diperbarui melalui berbagai regulasi agar tetap relevan dengan kondisi pertanian nasional.

2.4.1. Dasar Hukum Kebijakan Subsidi Pupuk

Dasar hukum kebijakan subsidi pupuk di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Landasan utamanya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang mengatur mekanisme pengadaan, distribusi, dan pengawasan agar pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 memberikan pedoman lebih rinci mengenai penetapan alokasi subsidi dan harga eceran tertinggi (HET) untuk berbagai jenis pupuk. Peraturan tersebut juga menetapkan komoditas prioritas penerima subsidi, seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian, diperbarui dengan Peraturan terbaru Menteri Pertanian Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, terdapat penambahan komoditas subsektor pangan, yaitu ubi kayu. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 dan Nomor 04 Tahun 2025, yang menyesuaikan alokasi subsidi dan HET dengan kondisi terkini, termasuk perubahan daftar komoditas prioritas dan penyesuaian harga subsidi. Selain itu, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 45.12/KPTS/SR.840/B/11/2022 Tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2023, memberikan panduan teknis dalam pengawasan distribusi subsidi pupuk untuk mencegah penyimpangan.

2.4.2. Tujuan Kebijakan Subsidi Pupuk

Pupuk bersubsidi memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, pupuk dipandang sebagai komoditas penting sehingga pemerintah memberikan subsidi untuk menjamin ketersediaannya. Melalui kebijakan ini, petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus memastikan distribusinya menjangkau hingga wilayah pelosok. Selain itu, kualitas pupuk yang disalurkan tetap terjaga karena harus memenuhi standar dan spesifikasi tertentu. Subsidi ini juga berfungsi mendorong petani agar tetap bertani secara berkesinambungan, karena biaya produksi dapat ditekan. Lebih jauh, ketersediaan pupuk bersubsidi berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian nasional

yang pada akhirnya memperkuat kedaulatan pangan dan mendukung stabilitas ekonomi negara (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2025).

2.4.3. Kelembagaan Pelaksana Kebijakan Subsidi Pupuk

Pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi dijalankan melalui mekanisme kelembagaan yang melibatkan berbagai pihak dari tingkat pusat hingga daerah. Di tingkat nasional, Menteri Koordinator Bidang Pangan berperan dalam sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian tata kelola subsidi pupuk. Menteri Pertanian bertanggung jawab menetapkan alokasi, jenis, jumlah, serta harga eceran tertinggi (HET) dan melakukan pengawasan di sektor pertanian, sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan alokasi untuk pembudi daya ikan. Sementara itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak perusahaannya berperan sebagai pelaksana teknis dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi hingga titik serah.

Di tingkat daerah, Gapoktan dan Pokdakan berfungsi sebagai penerima pupuk bersubsidi untuk kemudian menyalurkannya kepada anggota kelompok. Proses penyaluran juga dibantu oleh jaringan distributor, koperasi, dan pengecer resmi agar pupuk benar-benar sampai ke petani atau pembudi daya ikan. Untuk menjaga akuntabilitas, pengawasan dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di daerah serta lembaga pemeriksa keuangan seperti BPKP dan BPK. Dengan demikian, tata kelola pupuk bersubsidi memerlukan koordinasi lintas sektor antara kementerian, BUMN, lembaga petani, dan aparat pengawas agar kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

2.4.4. Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Pupuk

Mekanisme pelaksanaan pupuk bersubsidi diawali dengan penetapan alokasi oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian, berdasarkan kebutuhan riil yang diajukan kelompok tani dan pembudi daya ikan melalui sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Setelah itu, BUMN pupuk ditugaskan untuk memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, distribusi pupuk dilakukan melalui jaringan distributor resmi hingga mencapai titik serah di tingkat Gapoktan, Pokdakan, koperasi, atau kios pengecer. Petani dan pembudi daya ikan kemudian dapat membeli pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani yang sudah terdaftar dalam e-RDKK, dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Setelah pupuk tersalur, BUMN pupuk mengajukan penagihan subsidi kepada pemerintah untuk diverifikasi dan dibayarkan sesuai mekanisme keuangan negara. Seluruh proses ini diawasi secara berlapis oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), pemerintah daerah, dan lembaga pengawas keuangan untuk memastikan distribusi pupuk memenuhi prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat sasaran.